

PERAN BUMDES DALAM MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN DAN KEMANDIRIAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA TOMRA)

Engrith Grafelia Leunupun ^{1*}, Dolveci Aktawlor ²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, 97233

*Email : leunupun@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of village-owned enterprises (BUMDes) in increasing village entrepreneurship and independence in Tomra Village, Pulau Leti District, Southwest Maluku Regency. This type of research is a qualitative research with a descriptive analysis approach. This research was conducted using interview and documentation methods, where the resource persons in this study were village officials and local communities. The results showed that the Bumdes program in Tomra village which was managed to build entrepreneurship and independence in Tomra village was a gallon water business unit and a bus car business. This business unit has been established since June 15, 2018 which is jointly managed by the community and the village government. The success of the BUMDes in Tomra Village is very helpful for the village economy in terms of providing refilled water to support the availability of clean water for the community and buses to make it easier for people to travel.

KEYWORDS : BUMDes, Entrepreneurship, Village Independence

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan kewirausahaan dan kemandirian desa Di Desa Tomra Kecamatan Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, dimana narasumber pada penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bumdes desa Tomra yang dikelola untuk membangun kewirausahaan dan kemandirian di desa Tomra adalah unit usaha air galon dan usaha mobil bis. Unit usaha ini telah didirikan sejak 15 Juni 2018 yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa. Keberhasilan BUMDes desa Tomra sangat membantu perekonomian desa dalam hal penyediaan air isi ulang untuk menunjang ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan mobil bis untuk memudahkan masyarakat bepergian.

KEYWORDS : BUMDes, Kewirausahaan, Kemandirian Desa

Pendahuluan

Dalam strategi pembangunan nasional, desa terus mendapatkan perhatian besar, karena pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan publik untuk masyarakat secara menyeluruh dengan meletakkan konsep pembangunan dari desa ke kota (Suwarno, 2012). Dalam pembangunan desa, pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat

penting terutama dalam upaya menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat dipedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Pembangunan pedesaan diarahkan untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antar desa, dan memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh (Winarna, 2016).

Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang ingin diwujudkan oleh setiap negara. Untuk itu, melalui UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Noor (2015) terdapat tiga parameter kesejahteraan masyarakat yaitu adanya penghasilan yang memadai, tersedianya pilihan barang dan jasa dalam rangka memuaskan kebutuhan. Praktik kewirausahaan sosial merupakan sebuah alternatif berbasis masyarakat yang berpotensi menyempurnakan proses pembangunan. Kasmir (2014) menyatakan wirausahawan (*entrepreneur*) adalah orang yang bermental mandiri dan berjiwa berani mengambil risiko dalam berbagai kesempatan untuk membuka usaha tanpa diliputi rasa takut dan cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Saat ini salah satu bentuk praktik kewirausahaan yang semakin mengemuka dan terasa manfaatnya sebagai partner pembangunan adalah kewirausahaan sosial (Wibowo dan Nulhaqim, 2015).

Salah satu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah BUMDes pada tahun 2004. Merujuk pada buku panduan BUMDes (2007) "Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa". Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diatur dalam Peraturan Menteri tentang Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Menurut Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, tujuan dari dibentuknya BUMDes adalah sebagai instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi.

BUMDes di desa Tomra Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) berpihak kepada kepentingan masyarakat desa Tomra melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan untuk meningkatkan kewirausahaan dan kemandirian masyarakat sehingga perekonomian mereka dapat di tingkatkan baik itu untuk memperbaiki penghasilan perkapita keluarga maupun

memperbaiki profil desa secara keseluruhan. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Keberadaan BUMDes di desa Tomra memiliki peran yang sangat penting. Bumdes memiliki peran dalam membangun kewirausahaan dan kemandirian serta mengatur perekonomian desa dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa sehingga menjadi sumber ekonomi yang potensial guna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tomra dan menjadi desa yang mandiri.

Desa Tomra merupakan desa yang baru berbenah untuk mewujudkan kinerja dari pemerintahan desa dengan mengoptimalkan penggunaan dana desa secara efektif untuk keberlangsungan tingkat kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil pernyataan ketua Bumdes yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan BUMDes di desa Tomra telah membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan dan menjadi dasar PSAK ETAP seperti BUMDes lainnya. PSAK ini digunakan karena BUMDes masih terbilang usaha yang belum besar sehingga belum membutuhkan akuntan publik dalam pemeriksaannya nanti. Sesuai dengan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yang meliputi laporan laba/rugi, laporan perubahan equitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Namun laporan keuangan yang biasa disajikan oleh BUMDes desa Tomra hanya laporan laba/rugi, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, kemudian melakukan pelaporan pada kepala desa setiap tiga bulan sekali dan akan dilakukan tutup buku pada tiap akhir periode tahunan.

Namun, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan seperti sumber daya manusia pada pemerintahan yang terbilang masih sangat minim dari sisi kemampuan management, minimnya pemahaman tentang tatakelola penggunaan dana desa, kemampuan merancang, mempersiapkan dan melakukan program kerja masih sangat diabaikan. Hal ini didukung oleh data tingkat pendidikan di desa Tomra yang sebagian besar masyarakatnya tidak tamat SD yang berjumlah 1.132 orang dan hanya sebagian kecil yang berpendidikan tinggi S1 yaitu sebanyak 159 orang. kurangnya tingkat pendidikan tinggi masyarakat desa Tomra menjadi salah satu faktor terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola dana desa, merancang program kerja serta menciptakan lapangan kerja di desa. Fenomena tersebut membutuhkan upaya untuk memperbaiki fenomena yang terbilang sangat fundamental tersebut. Oleh karena itu, keberadaan BUMDes di desa Tomra kepulauan Letti diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan program-program yang sesuai dengan potensi desa yang terkonsentrasi pada pengembangan peternakan, pertanian dan perikanan. Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul. **“Peran**

Bundes Untuk Meningkatkan Kewirausahaan Dan Kemandirian Desa Di Desa Tomra”.

Tinjauan Literatur

Teori Agency

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith 1984). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat

mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*.

BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM), Rahardjo dan Ludigdo (2006).

Peran Teori Agency terhadap Penelitian

Peran teori agensi (*agency theory*) terhadap penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bahwa sebagai pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hal ini berarti kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dengan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui secara menyeluruh pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap apa yang dipercayakan kepadanya.

Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Tomra Kecamatan P.Leti Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara '*purposive*' yaitu didasarkan pada pertimbangan bahwa di desa Tomra merupakan salah satu desa yang telah memiliki BUMDes serta telah terjadi pengembangan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, desa Tomra juga merupakan salah satu desa yang memiliki beragam potensi sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan oleh BUMDes. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk meneliti peran BUMDes dalam membangun kewirausahaan dan kemandirian desa khususnya di desa Tomra.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, Sugiono 2011. Dalam pengembangan dan upaya peningkatan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan Badan usaha milik desa Tomra yang belum memaksimalkan kinerja untuk peningkatan kewirausahaan rakyat. Hal ini terlihat dari masih adanya usaha-usaha baru yang berbasis pada potensi masyarakat di desa Tomra yang selama ini belum sepenuhnya dikelola dengan baik seperti: kerajinan anyaman dari bambu, keripik singkong, kacang-kacangan dan buah-buahan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang desa Tomra Kecamatan pulau Leti, dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tomra. Data tersebut di peroleh dengan cara wawancara langsung dengan pengelola keuangan desa Tomra Kecamatan pulau Leti seperti sekretaris desa, bendahara desa, Tim Pelaksana Kegiatan desa, dan diluar pengelola keuangan desa yaitu ketua BPD, tokoh masyarakat, ketua RW desa Tomra Kecamatan pulau Leti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan Tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan Informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancarai adalah diantaranya sekretaris desa, bendahara desa, TPK desa, ketua BPD, ketua RW, dan tokoh masyarakat desa Tomra.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, dan atau karya monumental seseorang. Dokumen sangat berguna untuk penelitian jika peneliti ingin mendapatkan informasi mengenai sesuatu peristiwa yang telah terjadi tetapi kesulitan untuk menemui dan mewawancarai secara langsung para pelaku. Maka dari itu dokumen sangat mendukung dalam penelitian kualitatif. Adapun jenis dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang menyangkut dengan pengelolaan Alokasi Dana desa Tomra Kecamatan pulau Leti.

Hasil dan Pembahasan**Gambaran Umum BUMDes Desa Tomra**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Tomra telah membuat peraturan Desa No.4 Tahun 2016 Tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa. Tugas dan tanggungjawab badan pengurus dan pengelola melaksanakan kegiatan usaha dan unit-unit kegiatan usaha badan usaha milik desa dan melaporkan kemajuan dan perkembangan kepada badan pengawas dan pemerintah Desa Tomra. Pemerintah Desa Tomra membentuk BUMDes sebagai wadah dan penggerak perekonomian Desa. BUMDes juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa Tomra. BUMDes ini berdiri pada tanggal 15 juni 2018, dengan nama BUMDes SERLEY serta dilengkapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kurang lebih bumdes SERLEY ini telah berjalan selama 4 tahun. Selain untuk mengelola potensi desa yang dimiliki, BUMDes juga sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.

Tujuan pembentukan BUMDes SERLEY

- a. Meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) Desa Tomra dalam rangka meningkatkan kemajuan pemerintah Desa dan pendapatan masyarakat
- b. Pengembangan potensi perekonomian di wilayah Desa Tomra untuk mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat Desa Tomra secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes

- d. Mendukung upaya pemerintah desa dalam mewujudkan rencana pembangunan bidang perekonomian, menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mencapai tujuan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.

Program-program BUMDES dalam membangun kewirausahaan dan kemandirian di desa Tomra

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes wajib ada di setiap desa, seperti dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan undang-undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Maka berdasarkan UU tersebut, berdirinya BUMDes SERLEY yang dibentuk sejak tahun 2018 mampu menjadi alat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Tomra, menjelaskan bahwa: "Tujuan mendasar dilaksanakannya program BUMDes ini agar ekonomi masyarakat di desa Tomra bisa ditingkatkan. Salah satu faktor kenapa pemuda atau pemudi di desa lebih memilih ke kota ialah karena minimnya upah atau mungkin tidak tersedianya lapangan pekerjaan di desa. Jadi solusi terbaik yang kepala desa ambil yaitu mendirikan BUMDes dengan tujuan dapat meningkatkan perekonomian desa dan juga dengan adanya BUMDes desa dapat memiliki pendapatan sehingga dapat tercipta masyarakat yang mandiri".

Berikut merupakan program-program Bumdes desa Tomra yang dikelola untuk membangun kewirausahaan dan kemandirian di desa Tomra yang telah dilakukan oleh pengurus BUMDes SERLEY. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Tomra, mengatakan bahwa: "Program atau unit usaha yang didirikan dalam membangun kewirausahaan dan kemandirian di desa Tomra yaitu unit usaha air gallon dan usaha mobil bis. Unit usaha ini telah didirikan sejak 15 Juni 2018 yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa".

Menurut bapak Abner Kapasiang, selaku kepala desa Tomra mengungkapkan bahwa: "Usaha air galon merupakan salah satu usaha yang mengarah kepada pemenuhan air bersih. Untuk memenuhi gaya hidup masyarakat sekarang yang mengutamakan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang dulu terbiasa hidup dengan menggunakan tenaga sendiri sekarang terbiasa hidup dengan teknologi dan serba praktis. Jika dulu masyarakat terbiasa minum dengan air yang dimasak sendiri, sekarang masyarakat lebih

cenderung mengonsumsi air minum yang tidak perlu dimasak dan dapat diminum secara langsung yaitu air galon.

Hambatan BUMDes dalam membangun kewirausahaan dan kemandirian desa Tomra

Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes SERLEY di desa Tomra dinilai belum optimal pemanfaatannya. Walaupun kenyataannya pemerintah mendirikan badan usaha yang berguna sebagai lembaga penggerak perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Desa yang mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada kenyataannya dilapangan khususnya di Desa Tomra belum berjalan dengan efektif seperti yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya hambatan yang terjadi didalam lembaga tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yustus Daniel selaku Ketua BUMDes Desa Tomra yang menjelaskan bahwa ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya Modal yang dimiliki oleh BUMDes, sehingga membuat gerak BUMDes Tomra terbatas dalam menegembangkan unit usaha lainnya.
- b. Kurangnya keterampilan dan kecakapan sumber daya manusia dalam kepengurusan BUMDes. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya pendidikan masyarakat di desa Tomra.
- c. Manajemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik seperti perencanaan dalam menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan dan manfaat dengan maksimal.
- d. Faktor lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes dan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelola masyarakat.
- e. Kapasitas dan kemampuan pengelola terbatas dan kurang berjiwa *enterpreunership* yang pada akhirnya menjadi faktor penghambat utama dalam tumbuh kembang BUMDes di desa Tomra.

Bagaimana keberhasilan yang dicapai oleh BUMDes dalam membangun kewirausahaan dan kemandirian desa Tomra

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa, untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa. Ukuran keberhasilan program BUMDes di desa Tomra sulit untuk diukur karena memang masalah ekonomi itu kan relatif. Tidak ada patokan yang jelas kita sendiri kan repot untuk menentukan siapa yang kaya dan yang miskin. Jadi kalau kita ingin melihat kesejahteraan masyarakat, ya melalui apa yang sudah dilakukan oleh BUMDes. Saya rasa ya BUMDes cukup bermanfaat dengan adanya BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa Tomra. Salah satu bentuk yang konkrit adalah sebelum tahun 2021 BUMDes telah memberikan kontribusi kepada desa sebesar Rp.13.607,500 per tahun dan itulah pemasukan yang didapat desa setelah adanya BUMDes. Dampak dari keberadaan BUMDes di Desa Tomra selama empat tahun kepada masyarakat dirasakan sangat baik. BUMDes memberikan sebuah dampak tidak hanya kepada masyarakat namun juga berdampak kepada pemerintah desa. BUMDes Serley desa Tomra telah berhasil memberikan dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDes. Pelaksanaan BUMDes memberikan keuntungan materi sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa. Masyarakat desa Tomra juga berharap sebaiknya BUMDes kedepannya harus lebih bisa menjangkau semua kalangan yang ada di masyarakat desa Tomra. Contohnya dengan mendirikan sebuah program usaha yang dapat dilakukan oleh semua kalangan jadi dengan begitu kesejahteraan masyarakat dapat merata dengan baik.

Optimalisasi dana desa sehubungan dengan pengembangan BUMDES di desa Tomra menuju desa yang mandiri.

Dalam optimalisasi dana desa peranan pemerintah desa dan masyarakat desa merupakan hal yang sangat penting, karena pemerintah desa harus bersifat transparan atas dana yang diterima dan di keluarkan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dukungan serta partisipasi masyarakat juga akan sangat membantu untuk kelangsungan hidup Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah desa melibatkan masyarakat desa Tomra itu sendiri untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, hal ini dilakukan pemerintah desa bertujuan untuk mengurangi pengangguran yang ada di desa Tomra dan menjadikan desa Tomra sebagai desa yang mandiri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tomra sudah berupaya untuk mengoptimalkan pengalokasian dana desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, yang saat ini sudah berdiri dua unit

Badan Usaha Milik Desa yaitu usaha air isi ulang atau air galun dan usaha mobil bis yang di bangun dan di kembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa dan di biyai oleh dana desa. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Tomra yakni bapak Abner kapasiang, menjelaskan bahwa” masyarakat desa Tomra dalam mengoptimalkan dana desa juga melakukan pengembangan infrastruktur sarana prasarana desa Tomra dengan sasaran pengentasan kemiskinan.

Bagaimana tata kelola BUMDes di desa Tomra

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang pengelolaannya dikelola oleh masyarakat beserta pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian suatu desa dan dibentuk berdas arkan kebutuhan dan potensi dari desa tersebut. Melalui musyawarah desa, pemerintah desa berpartisipasi di dalam perkembangan pengelolaan BUMDes atas persetujuan dari badan permusyawaratan desa (LPD) dan lembaga perwakilan masyarakat (LPM). Hal ini dapat dilihat dari penyusunan perencanaan pembangunan desa yaitu RPJM desa dan RKP desa, BUMDes mendapat perhatian dengan disetujuinya beberapa program kegiatan BUMDes masuk di dalam RPJM desa dan menjadi prioritas usulan pada RKP desa setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya BUMDes SERLEY desa Tomra dikelola oleh masyarakat dengan perwakilan dari pemerintah desa sebanyak 5 orang, 3 orang sebagai pengurus dan 2 orang sebagai anggota pengawas, beserta kepala desa yang menjadi yang pelindung BUMDes SERLEY desa Tomra.

Bagaimana prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam BUMDes yang ada di desa Tomra.

BUMDes SERLEY dalam pertanggungjawaban segala kegiatan yang dilakukan di desa Tomra, BUMDes ini dilakukan dengan cara mengadakan rapat pada musyawarah desa yang dilakukan setahun sekali pada akhir tahun. Hal yang dibahas adalah pelaporan pertanggungjawaban oleh seluruh pengurus bumdes yang melibatkan tokoh-tokoh penting desa, beserta beberapa wakil dari masyarakat di Desa Tomra dan juga dalam rapat musyawarah desa juga membahas hal-hal yang belum terealisasikan oleh BUMDes. Jika terdapat kegiatan yang belum berjalan secara efektif, maka hal ini akan direalisasikan tahun berikutnya. Selain itu, bentuk pengeluaran dan pemasukan yang didapatkan oleh BUMDes ini baik itu mendapatkan laba ataupun rugi yang menyangkut kegiatan operasional BUMDes ini dipublikasikan secara terbuka dan ditempelkan pada sisi lobi BUMDes SERLEY desa tomra. Jadi dapat dikatakan bahwa BUMDes SERLEY Desa Tomra ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap segala aspek kegiatan operasional, baik secara internal maupun eksternal.

Kesimpulan

1. Program-program Bumdes desa Tomra yang dikelola untuk membangun kewirausahaan dan kemandirian di desa Tomra yang telah dilakukan oleh pengurus BUMDes SERLEY adalah unit usaha air gallon dan usaha mobil bis. Unit usaha ini telah didirikan sejak 15 Juni 2018 yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa serta potensi usaha desa Tomra yang selama ini belum sepenuhnya dikelola dengan baik seperti: kerajinan anyaman dari bambu, keripik singkong, kacang kacangan dan buah-buahan.
2. Ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pengembangan BUMDes antara lain: kurangnya Modal yang dimiliki oleh BUMDes, kurangnya keterampilan dan kecakapan sumber daya manusia dalam pengurusan BUMDes, manajemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes dan masih minimnya partisipasi masyarakat dan Kapasitas dan kemampuan pengelola terbatas dan kurang berjiwa *enterpreunership*.
3. Keberhasilan yang dicapai oleh BUMDes DESA Tomra yaitu lebih kepada membantu perekonomian desa dalam hal penyediaan air isi ulang untuk menunjang masyarakat kepada air bersih yang tidak perlu dimasak dan mobil bis untuk memudahkan masyarakat bepergian. Dengan begitu perkembangan Bumdes akan lebih meningkat.
4. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tomra sudah berupaya untuk mengoptimalkan pengalokasian dana desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, yang saat ini sudah ada dua Badan Usaha Milik Desa yaitu usaha air isi ulang atau air gallon dan usaha mobil bis serta melakukan pengembangan infrastruktur sarana prasarana desa Tomra dengan sasaran pengentasan kemiskinan.
5. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang pengelolaannya dikelola oleh masyarakat beserta pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian suatu desa dan dibentuk berdasar arkan kebutuhan dan potensi dari desa tersebut. Melalui musyawarah desa, pemerintah desa berpartisipasi di dalam perkembangan pengelolaan BUMDes atas persetujuan dari badan permusyawaratan desa (LPD) dan lembaga perwakilan masyarakat (LPM). BUMDes SERLEY desa Tomra ini dikelola oleh masyarakat dengan perwakilan dari pemerintah desa sebanyak 5 orang, 3 orang sebagai pengurus

dan 2 orang sebagai anggota pengawas, beserta kepala desa yang menjadi yang pelindung BUMDes SERLEY desa tomra.

6. BUMDes SERLEY dalam pertanggungjawaban segala kegiatan di desa Tomra, BUMDes ini dilakukan dengan cara mengadakan rapat pada musyawarah desa yang dilakukan setahun sekali pada akhir tahun. Hal yang dibahas adalah pelaporan pertanggungjawaban oleh seluruh pengurus bumdes yang melibatkan tokoh-tokoh penting desa, beserta beberapa wakil dari masyarakat di Desa Tomra. Jika terdapat kegiatan yang belum berjalan secara efektif, maka hal ini akan direalisasikan tahun berikutnya. Selain itu, bentuk pengeluaran dan pemasukan yang didapatkan oleh BUMDes ini baik itu mendapatkan laba ataupun rugi, yang menyangkut kegiatan operasional BUMDes ini dipublikasikan secara terbuka dan ditempelkan pada sisi lobi BUMDes SERLEY desa tomra.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah Desa Tomra
Untuk lebih meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya dengan cara mengundang masyarakat untuk dapat ikut serta mengelola potensi desa dengan membentuk kelompok-kelompok usaha dan memberikan pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan bagi anggota dari masing-masing kelompok usaha sehingga masyarakat dapat menjadi lebih mandiri, kreatif, inovatif.
2. Bagi BUMDes desa Tomra
Diharapkan agar juga mengembangkan usaha-usaha baru yang berbasis pada potensi masyarakat di desa Tomra yang selama ini belum sepenuhnya dikelola dengan baik seperti: kerajinan anyaman dari bambu, keripik singkong, kacang kacangan dan buah-buahan serta mengembangkan potensi lainnya dibidang pertanian dalam mewujudkan kewirausahaan dan kemandirian desa Tomra.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kewirausahaan dan kemandirian masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian. 2017. *Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), hal.1
- Husaini, U. S. 2003. *Pengantar Statistika* (Jakarta: PT Bumi Aksara, h.241. Hernowo B. 2004. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*, Jakarta: BAPPENAS.
- Herry K. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hal. 2.
- Kaswan, & A. S. 2017. *Social Entrepreneurship (Mengubah Masalah Sosial Menjadi Peluang Usaha)*. Bandung: Alfabeta.
- Lind, M. Dkk. 2016. *Tekhnik-Tekhnik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Edisi 15 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, h. 10. 91.
- Sugiyono. 2014. *“Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, h. 792.
- Mubyarto, dkk. 2014. *Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, hal. 111.
- Muryanti, M. 2020. *Menuju Kewirausahaan Sosial di Desa melalui Badan Usaha Milik Desa*. 8(1), 170–181.
- Nugroho, B. 2016. *Pengantar Statistika Ekonomi Dan Bisnis Jilid 1*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, h. 18-19. 94
- Lind, M. Dkk. 2016. *Tekhnik-Tekhnik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Edisi 15 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, h. 10.
- Noor, H. F. 2015. *Ekonomi Publik Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Indeks.
- Kasmir. 2014. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo, H & Nulhaqim, S. A. 2015. *Kewirausahaan Sosial; Revolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*. Bandung: UNPAD Press.
- Rahardjo, A. 2013. *Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 73.
- Sapari Imam Asy'ari, *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 2004, hal. 56.
- Seelos, C., & Mair, J. 2010. The embeddedness of social entrepreneurship: Understanding variation across local communities. *Forthcoming in: Research in the Sociology of Organizations*, 33, 1–42.
- Sugiyono. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, h.3
- Solimun, A. A. Dkk. 2017. *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpLS*, (Malang: UB Press), h. 10.
- Sadjiarto, A. 2000. Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol, 2, No. 2. Hal, 138-150.
- Suwarno, J. 2012. Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan KTP Dan KK Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, 1, 184–213.
- Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2014 Pasal 135.
<http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdesyang-harus-anda-ketahui>.